GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar	**:**	**Kompas**	**Tgl/Bln/Thn**	**:**	**10 November 2007**
Subyek	**:**	**Lumpur Lapindo**	**Hari**	**:**	**Sabtu**
			Halaman	**:**	**15**

Semburan Liar Bertambah Lagi

Sidoarjo, Kompas - Satu lagi semburan liar berupa air dan gas, Kamis (8/11) pukul 08.00, muncul di Desa Pejarakan, Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, berjarak 1,2 kilometer sebelah selatan pusat semburan lumpur di Porong. Semburan itu merupakan semburan liar ke-73 di sekitar semburan lumpur utama.

Semburan di RT 8 RW 1 Desa Pejarakan itu membuat Alifah, warga yang rumahnya berjarak 100 meter dari semburan, panik. Namun, Alifah tak jadi mengungsi karena semburan keluar setiap lima menit dan tidak berbahaya.

Jumat petang Tim Lapindo Brantas Inc berkunjung ke harian Kompas di Jakarta, memberikan penjelasan teknis, dan penanganan pascasemburan berupa pengendalian lumpur. Dirinci pula penanganan terus-menerus dampak sosial semburan, senilai Rp 1,850 triliun.

Jumat malam, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan terus memperbarui data dan laporan dugaan indikasi pelanggaran HAM. Komnas HAM telah mengirimkan komisionernya, Syafruddin Ngulma Simeulue ke Sidoarjo. Jika indikasi pelanggaran HAM itu kemudian dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat oleh rapat paripurna Komnas HAM, pihaknya akan membentuk tim ad hoc guna penyelidikan pro justicia.

Tim Lapindo Brantas yang dipimpin Imam Pria Agustino (Satuan Tugas Lapindo untuk Musibah Lumpur Sidoarjo), didampingi Yuniwati Teryana (Kepala Divisi Humas Lapindo), menegaskan bahwa semburan lumpur pertama tanggal 29 Mei 2006 muncul di luar pusat pengeboran minyak Lapindo Brantas (berjarak 200 meter dari pusat pengeboran). Mereka menjelaskan bahwa semburan lumpur ditengarai terkait serangkaian bencana alam, seperti mud volcano.

Adapun bentuk tanggung jawab sosial Lapindo antara lain pemberian ganti rugi tanah (yaitu pembelian tanah dan bangunan terdampak), berbagai bantuan sosial dari sewa rumah, pemberian jaminan hidup, pembangunan sarana pengungsian, bantuan pendidikan, penyediaan layanan kesehatan, relokasi sejumlah pabrik, usaha kecil menengah, penyewaan tanah, dan kompensasi gagal panen. (APA/JOS/HRD)

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP